



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pengelolaan Diabetes dan Hipertensi Lewat Prolanis

SIDOARJO – BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo menggelar kegiatan media gathering bersama insan pers di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (17/12/25), bertempat di Kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo lantai 4. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi dengan media sekaligus meningkatkan pemahaman publik terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Media gathering tersebut mengangkat tema “Pengelolaan Penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).”

Prolanis merupakan program BPJS Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup peserta JKN yang menderita penyakit kronis melalui pelayanan kesehatan yang terintegrasi, proaktif, dan berkesinambungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Wenan Setyo Nugroho, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang hadir. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo, Bapak Munaqib, yang berhalangan hadir karena agenda lain yang bersamaan.

“Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada kegiatan gathering ini. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Munaqib

selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo berhalangan hadir karena bersamaan ada kegiatan. Kesibukan beliau juga luar biasa,” ujar Wenan.

Ia menegaskan, kegiatan media gathering menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi program BPJS Kesehatan kepada masyarakat secara benar melalui peran media.

“Beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Namun yang utama, ada sesuatu yang penting kami lakukan, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program BPJS Kesehatan melalui kegiatan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu narasumber sekaligus pemateri, dr. Shinta Febrina Nasution, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan terus memperkuat layanan promotif dan preventif dalam Program JKN.

“BPJS Kesehatan terus memperkuat layanan promotif dan preventif dalam Program JKN, salah satunya melalui skrining riwayat kesehatan yang wajib dilakukan peserta, khususnya Prolanis. Skrining ini bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien,” jelas dr. Shinta. • Loe



.Media gathering BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo bersama insan pers di Kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo lantai 4, Rabu (17/12/25). (FT/)

Dipindai dengan CamScanner

DUTA
MASJIDIRAJA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kamis Wager, 18 Desember 2025

Bhirawa Halaman 12

Presiden Prabowo Tanda Tangani Aturan Kenaikan Upah Minimum



Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa
Media Digital Media Printed

Jakarta, Bhirawa
Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9.poin.

"Alhamdulillah, PP pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025)," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023.

Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023,

rentang Alfa ditetapkan 0,1-0,3 poin. Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5-0,9 poin.

"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP pengupahan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata dia.

Yassierli pun meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya

24 Desember 2025.

Dalam PP terbaru, kata dia, juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

"Kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," ucapnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk

segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

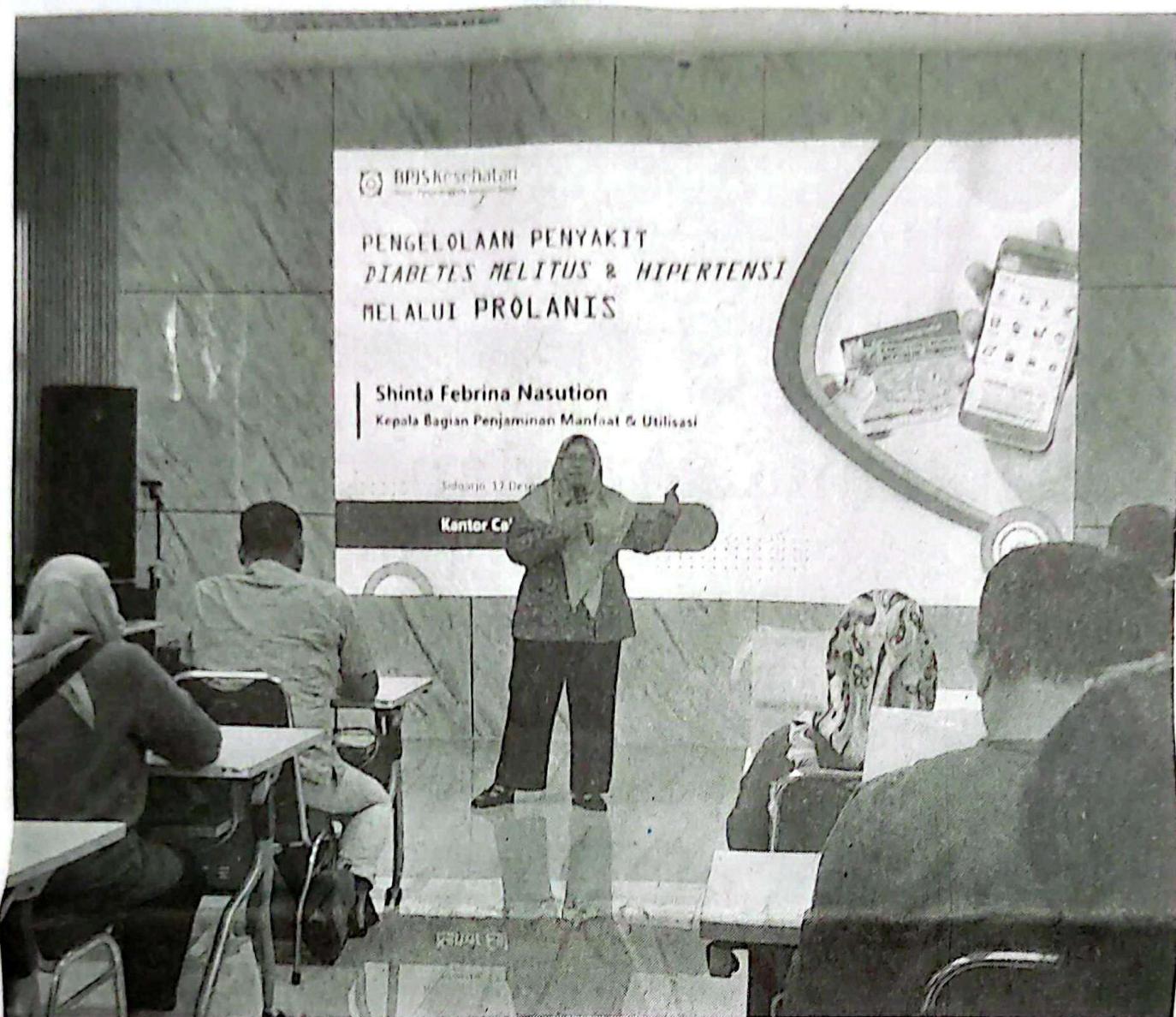
MK memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk merampungkan UU Ketenagakerjaan yang baru. MK juga mengingatkan agar pembuatan UU tersebut harus melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja maupun buruh.

"Proses penyusunan PP pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden," ujar Yassierli. [ant.kt]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BPJS Kesehatan Sidoarjo saat sosialisasi program Prolanis, Rabu (17/12).

DM dan HD Jadi Top 10 Diagnosa Tertinggi

BPJS Kesehatan Siapkan Prolanis

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Diabetes Melitus (DM) dan Hypertensive Diseases (HD) menjadi diagnosa tertinggi yang ditangani Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FK-TRL) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo.

Kabag Penjamin Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Sidoarjo, Shinta Febrina Nasution menjelaskan, sampai dengan Desember 2025, jumlah DM sebanyak 330.051 kasus dan HD sebanyak 515.171 kasus.

Kata Shinta, dari tren sejak Desember 2019 sampai dengan November 2025, ada peningkatan peserta yang terdiagnosa DM dan HD sebesar dua kali lipat. "Hal tersebut tentunya

diperlukan pelayanan promotif dan preventif sebagai upaya menurunkan penyakit kronis tersebut," cetus Shinta, Rabu (17/12).

Ia menambahkan, penyakit DM dan HD dapat dikelola melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Kegiatan ini terintegrasi antara Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Adapun untuk kegiatannya itu, seperti konsultasi kesehatan, pelayanan obat, pemeriksaan penunjang, edukasi dan senam.

Shinta menambahkan, peserta dapat melakukan skrining riwayat kesehatan melalui ap-

likasi Mobile JKN, Website BPJS Kesehatan, Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (Pandawa) atau datang langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Menurutnya, skrining riwayat kesehatan wajib dilakukan sebelum peserta memperoleh pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu.

Dari hasil tersebut, nanti akan didapati apakah berisiko penyakit atau tidak berisiko. Jika berisiko, maka disarankan untuk langsung berkunjung ke FKTP terdaftar. Sedangkan jika tidak berisiko penyakit, peserta dapat mempertahankannya melalui edukasi perilaku hidup sehat. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Proyek Alun-alun Sidoarjo Molor, Kontraktor Diwarna

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pembangunan Alun-Alun Sidoarjo mberdol mburi. Proyek yang didanai APBD itu mengalami keterlambatan dari jadwal perencanaan awal.

Proyek yang semestinya rampung 15 Desember 2025, hingga kini belum selesai, dan memasuki masa perpanjangan waktu pelaksanaan hingga 26 Desember 2025.

Selama masa perpanjangan, kontraktor dikenai denda keterlambatan sebesar Rp25 juta per hari, dengan total denda berjalan yang dapat mencapai Rp250 juta hingga proyek benar-benar diselesaikan. Hingga Selasa, 16 Desember 2025, progres-

nya mencapai 90,013 persen dengan deviasi 9,98 persen.

Bupati Sidoarjo Subandi memberikan peringatan keras kepada pelaksana proyek atas molornya pengerjaan sekaligus adanya perbedaan antara perencanaan yang dipaparkan kepada bupati dengan realisasi di lapangan.

Ia menegaskan, ketidaksesuaian tersebut tidak bisa ditoleransi. Terlebih proyek ini merupakan ruang publik strategis bagi masyarakat. "Yang saya terima dalam perencanaan dan paparan berbeda dengan yang ada di lapangan. Ini harus menjadi perhatian serius," tegas Subandi usai rapat internal di Opsroom Setda Sidoarjo.



Bupati Sidoarjo Subandi memimpin rapat.

Salah satu sorotan utama Subandi adalah perbedaan desain dan spesifikasi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurutnya, PJU di Alun-Alun

Sidoarjo dan di pendopo sisi depan seharusnya memiliki desain yang seragam, seperti yang telah diterapkan di kawasan GOR Sidoarjo, agar

menciptakan identitas visual kota yang konsisten.

"Lampu PJU di Sidoarjo seharusnya diseragamkan seperti di GOR Sidoarjo. Tapi yang terpasang justru berbeda dengan rencana," urainya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan pengawasan ketat agar proyek segera dituntaskan sesuai spesifikasi yang telah direncanakan. Diharapkan, perbaikan dan penyelesaian pembangunan Alun-Alun Sidoarjo dapat segera dilakukan sehingga fasilitas publik tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat dengan kualitas yang standar dan mencerminkan wajah kota Sidoarjo. (md/rus)

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BKD Bakal Sanksi ASN yang Membolos di Masa Nataru

Perbolehan Izin Cuti

SIDOARJO – Jelang libur panjang di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) Badan Kependidikan Daerah (BKD) Sidoarjo mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tertib. ASN yang kedap-

an membolos di masa liburan bakal dikenai sanksi secara langsung.

Kepala BKD Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir menegaskan nantinya ada libur bersama selama tiga hari mulai 25 hingga 27 Desember. Selain tanggal tersebut, pegawai diperbolehkan cuti diwaktu lain. "Pegawai kalau mau cuti silahkan. Yang penting



Nanti, akan ada hukuman disiplin berjenjang jika aturan dilanggar."

Ahmad Misbahul Munir
Kepala BKD Sidoarjo

dapat izin atasan," ujarnya kemarin (17/12).

Munir menegaskan jika pemkab memberikan kesempatan pegawai berlibur. Namun

mereka tidak boleh melanggar aturan. Sehingga pengajuan cuti harus dilakukan secara prosedur yang benar. Beban pekerjaan menjadi pertim-

bang utama cuti disetujui atau tidak.

Cuti hanya diizinkan jika seluruh pekerjaan akhir tahun sudah rampung. Pegawai yang libur tanpa mengajukan cuti akan masuk kategori pelanggaran disiplin. "Nanti, akan ada hukuman disiplin berjenjang jika aturan dilanggar," kata Munir. (ful/hen)

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kontraktor Alun-Alun Didenda Rp 24,6 Juta Per Hari

Pengerjaan Molor dari Deadline

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo memberikan sanksi denda untuk kontraktor alun-alun. Kebijakan itu diberlakukan karena proyek belum rampung hingga batas waktunya yang ditetapkan. Saat ini, kontraktor kena denda Rp 24,6 juta per hari.

Proyek pembangunan ulang alun-alun seharusnya selesai Senin (15/12). Namun hingga kemarin (17/12), pembangunan belum tuntas. Pemasangan paving, keramik dan

lampu masih berlangsung. Eskavator juga masih bekerja di lokasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Bahru Amig mengatakan denda yang diberikan merupakan konsekuensi dari keterlambatan pekerjaan. Itu tanggung jawab penyedia jasa. "Sesuai ketentuan, denda dikemukakan sebesar 0,1 persen dari nilai kontrak per hari," katanya.

Progres 90 Persen

Dengan nilai proyek sebesar Rp 24,6 miliar maka denda yang harus dibayar kon-



BELUM TUNTAS: Proyek Alun-Alun Sidoarjo masih memasuki tahap pemasangan paving hingga kemarin (17/12).

traktor mencapai Rp 24,6 selama sepuluh hari sudah juta per hari. Meski permo- disetujui, kontraktor tetap dikenai denda.



Sesuai ketentuan, denda dikenakan sebesar 0,1 persen dari nilai kontrak per hari."

Bahru Amig
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo

Kabid Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) DLHK Sidoarjo Heri Santoso

PEMBANGUNAN ALUN-ALUN SIDOARJO

Deadline proyek Senin (15/12)

Pembangunan masih belum tuntas hingga saat ini

Kontraktor diwajibkan bayar denda Rp 24,6 juta per hari

Proyek diharapkan selesai 26 Desember 2025

sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Grafis: HERI LAMAHABES/JAWA POS

waktu yang diberikan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kontraktor. Ingatnya seluruh pekerjaan selesai pada 26 Desember mendatang. Sehingga alun-alun bisa dinikmati masyarakat saat perayaan tahun baru. (ful/hen)

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DELTASIANA



DOK BPBD SIDOARJO

APD LENGKAP: Petugas BPBD Sidoarjo mengevakuasi sarang tawon berdiameter 55 sentimeter di Desa Ganggang Panjang.

Evakuasi Sarang Tawon Jumbo Pakai Baju "Astronot"

SIDOARJO – Awalnya berukuran kecil. Namun sarang tawon yang sebelumnya dianggap biasa itu semakin membesar dan meresahkan. Salah satu warga Desa Ganggang Panjang, Kecamatan Tanggulangin memutuskan untuk meminta bantuan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo.

Sarang tawon berada atas pohon dengan ketinggian sekitar lima meter. Ukurannya sebesar kepala manusia dengan diameter 55 sentimeter. BPBD menerjunkan Regu I Rescue untuk melakukan evakuasi.

Proses tersebut dilakukan Senin (15/12) pukul 11.50 hingga 13.00 WIB dengan bantuan alat pelindung diri khusus. Termasuk helm Petzl, sarung tangan dan dua set APD khusus tawon seperti baju astronot. Satu unit mobil operasional rescue juga dikerahkan untuk mendukung proses penanganan.

Plt Kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo Sabino Mariano mengatakan sarang tawon raksasa itu berpotensi membahayakan keselamatan warga. Sehingga petugas memutuskan untuk mengambilnya. (ful/hen)



Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Tolak Alih Fungsi Lapangan Sidokare

Sebut Lahan dari
Urunan Tanah Gogol

SIDOARJO – Rencana alih fungsi lapangan sepak bola di Kelurahan Sidokare mendapat penolakan sebagian warga. Masyarakat merasa keberatan jika sarana olahraga itu dibongkar dan diubah jadi penampungan air.

Ketua RW 08 Sidokare Budi Siswanto mengatakan, sejak awal lapangan diperuntukkan untuk berolahraga. Sehingga harapannya tidak ada perubahan fungsi nantinya. Selain itu, Budi menilai pembangunan bozem di lokasi tersebut tidak akan efektif.

"Kalau melihat luasnya, saya rasa bozem di lapangan itu tidak punya efek besar untuk mengendalikan banjir di Sidokare," ujarnya kemarin (17/12). Menurut Budi, lapangan bola sudah ada sejak Sidokare masih berstatus desa. Lahan itu berasal dari urunan tanah gogol warga yang kemudian diserahkan kepada pemerintah. "Dulu itu urunan tanah gogol disana untuk dibuat fasilitas umum," katanya.

Fungsi Sosial Dipertimbangkan

Meski sementara belum milik pemkab setelah perubahan status menjadi kelurahan, Budi ber-



FASILITAS UMUM: Warga berharap Lapangan Sidokare tetap menjadi sarana olahraga.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

harap fungsi sosialnya tetap dipertimbangkan. "Kami inginkan lapangan tetap bisa dipakai warga," katanya.

Lurah Sidokare Lilik Murtiningsih membenarkan soal

adanya wacana wacana pembangunan bozem. Mengenai apakah efektif untuk mengendalikan banjir, Lilik belum berani berkomentar lebih. Begitupun soal penolakan

warga. Lilik hanya mengungkapkan bahwa lapangan merupakan aset Pemkab Sidoarjo. Sehingga peruntukannya menjadi kewenangan pemerintah. (eza/hen)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



AKSI SOSIAL:
Dewi Ayu
Pratikno (kiri)
mendonor darahnya di
Unit Transfusi
Darah PMI
Kabupaten
Sidoarjo
kemarin
(17/12).

PMI Pastikan Stok Darah Aman saat Libur Panjang

Kebutuhan

Diprediksi Meningkat

SIDOARJO – Kebutuhan darah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diprediksi meningkat seiring mobilitas warga. Sementara jumlah pendonor cenderung menurun karena liburan. Saat ini, Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Sidoarjo memastikan stok darah aman saat Nataru.

Humas UTD PMI Sidoarjo Arifah mengungkapkan, kebutuhan darah tetap dibuka selama 24 jam. PMI akan melakukan sejumlah langkah untuk menambah stok.

"Selain memfokuskan kegiatan donor darah di perusahaan, PMI juga mendapat dukungan dari remaja masjid dan majelis taklim," kata Arifah.

Di antaranya stok darah aman. Stok Whole Blood (WB) dan Packed Red Cell (PRC) berada di angka 978 kantong. Jumlah tersebut berada berada di atas batas aman minimal yakni 700 kantong. UTD PMI Sidoarjo masih akan mendapatkan tambahan sekitar 300 kantong darah lagi.

Menurut Arifah, UTD PMI Sidoarjo akan libur sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB). Namun pelayanan darah untuk pasien tetap dibuka selama 24 jam. PMI akan melakukan sejumlah langkah untuk menambah stok.

Seiring dengan kebutuhan darah yang meningkat, Arifah mengingatkan masyarakat agar selalu berdonor darah. "Persepsi bahwa berdonor darah berdampak pada bertambahnya kecelakaan. Sebenarnya kebutuhan darah tetap naik," katanya.

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PROYEK ALUN-ALUN MOLOR DENDA BERJALAN, BUPATI SUBANDI BERI PERINGATAN KERAS

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pembangunan Alun-Alun Sidoarjo mengalami keterlambatan dari jadwal perencanaan awal. Proyek yang semestinya rampung pada 15 Desember 2025 hingga kini belum selesai dan telah memasuki masa perpanjangan waktu pelaksanaan hingga 26 Desember 2025.

Selama masa perpanjangan, kontraktor dikenai denda keterlambatan sebesar Rp25 juta per hari, dengan total denda berjalan yang dapat mencapai Rp250 juta hingga proyek benar-benar diselesaikan. Hingga Selasa (16/12/2025) progresnya mencapai 90,013 persen dengan deviasi 9,98 persen.

Bupati Sidoarjo, Subandi, memberikan peringatan keras kepada pelaksana proyek atas molonya pengerejaan sekaligus adanya perbedaan antara perencanaan yang dipaparkan kepada bupati dengan realisasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak bisa ditoleransi, terlebih proyek



ini merupakan ruang publik strategis bagi masyarakat.

"Yang saya terima dalam perencanaan dan paparan berbeda dengan yang ada di lapangan. Ini harus menjadi perhatian serius," tegas Subandi usai rapat internal di Opsroom Setda Kab. Sidoarjo.

Salah satu sorotan utama

Bupati Subandi adalah perbedaan desain dan spesifikasi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurutnya, PJU di Alun-Alun Sidoarjo dan di Pendopo sisi depan seharusnya memiliki desain yang seragam, seperti yang telah diterapkan di kawasan GOR Sidoarjo, agar menciptakan identitas visual kota

yang konsisten.

"Lampu PJU di Sidoarjo ini seharusnya diseragamkan seperti di GOR Sidoarjo. Tapi yang terpasang justru berbeda dengan rencana," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan pengawasan ketat agar proyek segera dituntaskan

sesuai spesifikasi yang telah direncanakan. Diharapkan, perbaikan dan penyelesaian pembangunan Alun-Alun Sidoarjo dapat segera dilakukan sehingga fasilitas publik tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat dengan kualitas yang sesuai standar dan mencerminkan wajah kota Sidoarjo. (Khol/Dy)

CS Dipindai dengan CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ILUSTRASI: Pemilihan Kepala Desa di Sidoarjo.

Jelang Pilkades 2026, Pemilih Pemula Bertambah

MENJELANG Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, peta pemilih di Kabupaten Sidoarjo kembali mengalami perubahan signifikan. Jumlah pemilih tercatat terus bertambah, terutama didorong oleh masuknya pemilih pemula yang telah mengantongi kartu tanda penduduk (KTP).

Berdasarkan rekapitulasi data Triwulan IV 2025, jumlah pemilih di Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.546.129 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 6.733 pemilih dibandingkan Triwulan III 2025 yang tercatat sebanyak 1.539.396 pemilih.

• Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner

Diperbaik oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Jelang Pilkades 2026,...

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sidoarjo, Agisma Dyah Fastari, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah pemilih tersebut didomi-

nasi oleh pemilih baru dari kalangan generasi muda.

“Lonjakan pemilih ini banyak didorong oleh pemilih pemula. Saat ini cukup banyak pelajar SMA yang telah melakukan perekaman dan pencetakan KTP, sehingga otomatis

ma
Agi
S
lak
me
bak
S

CS Dipindai dengan CamScanner

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Penolakan Pemakaman Gegerkan Warga Desa Grogol Tulangan

■ Viral di Media Sosial

Linimasa media sosial di Sidoarjo digemparkan oleh beredarnya video yang memperlihatkan penolakan proses pemakaman jenazah di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan. Dalam narasi video tersebut disebutkan bahwa penolakan terjadi akibat persoalan akses jalan menuju area pemakaman.

Suryanto, Wartawan Radar Sidoarjo

BERDASARKAN informasi yang dihimpun Radar Sidoarjo, peristiwa itu terjadi pada Rabu (17/12) pagi di makam Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Salah seorang warga setempat, Rangga, menjelaskan bahwa penolakan pemakaman bukan disebabkan oleh penolakan warga terhadap jenazah. Menurutnya,

persoalan tersebut murni dipicu oleh konflik internal terkait akses jalan menuju makam.

Permasalahan tersebut melibatkan dua pihak, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga yang tinggal di sekitar area makam. "Awalnya aman-aman saja, adem ayem. Bahkan sebelumnya ada warga perumahan, tetangga saya, yang meninggal dan dimakamkan di situ.

Namun belakangan muncul permasalahan antara BPD dan warga sekitar makam, sehingga akses jalan akhirnya ditutup," ujar Rangga.

Rangga menambahkan, jenazah yang hendak dimakamkan merupakan warga pendatang yang telah lama menetap di Desa Grogol dan secara administratif sudah tercatat sebagai warga setempat. Almarhum juga terdaftar sebagai anggota paguyuban Desa Grogol.

• Ke Halaman 10



VIRAL:
Penolakan
akses jalan,
jenazah
akhirnya
dimakamkan
di Tempat
Pemakaman
Umum
Praloyo.



Dipindai dengan CamScanner



Penolakan Pemakaman...

"Beliau pendatang seperti saya, bukan asli Grogol, tetapi KTP-nya sudah pindah ke sini dan ikut paguyuban Grogol," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sejak dulu makam di kawasan perumahan tersebut menyatu dengan makam desa dan telah dilengkapi plakat sebagai

penanda. Akibat adanya penolakan akses jalan, jenazah akhirnya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Praloyo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun BPD setempat terkait penyelesaian persoalan akses jalan menuju makam tersebut. (sur/vga)

Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KETAHANAN PANGAN: Wabup Sidoarjo serahkan mesin kombi ke kelompok tani di Balai Desa Tarik, Kecamatan Tarik.

Dipindai dengan CamScanner



Dorong Modernisasi Pertanian...

dan dirawat secara bersama oleh kelompok tani, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. "Gunakan secara berkelompok, dirawat dengan baik, jangan hanya dipakai sekali. Harapannya alat ini benar-benar meningkatkan produksi pangan,

khususnya di Desa Tarik," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mimik turut mengapresiasi peran Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan yang dinilai konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dalam peningkatan sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap aspirasi warga.

"Kami tidak akan tahu persoalan di desa kalau tidak ada sambutan atau keluhan. Maka jangan ragu menyampaikan aspirasi, karena APBD itu memang hak masyarakat untuk membangun desanya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tarik Ifanul Irfandi menyambut baik bantuan Alsintan yang diberikan kepada

kelompok tani di wilayahnya. Ia menilai mesin kombi tersebut sangat dibutuhkan untuk menekan biaya operasional sekaligus mempercepat proses tanam hingga panen.

"Bantuan Alsintan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan

petani dan memperkuat ketahanan pangan di desa kami," tandasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah desa dapat terus terjalin dengan baik agar pembangunan sektor pertanian di Desa Tarik berjalan semakin optimal. (dik/vga)

Dorong Modernisasi Pertanian, Wabup Serahkan Mesin Kombi untuk Petani Tarik

KOTA-Urgensi memperkuat ketahanan pangan dan mendorong modernisasi pertanian terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana secara langsung menyerahkan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berupa mesin kombi kepada kelompok tani di Balai Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Selasa (16/12).

Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pangan dan Pertanian, yang bersinergi dengan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan, untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Wabup Mimik Idayana menegaskan, sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama perekono-

mian Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, pemerintah daerah berupaya hadir dengan dukungan nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

"Pertanian adalah tulang punggung perekonomian daerah. Bantuan Alsintan ini kami berikan agar petani lebih mudah mengolah lahan, prosesnya lebih cepat, dan hasil panennya meningkat," ujar Mimik.

Menurutnya, penggunaan alat pertanian modern seperti mesin kombi mampu mengurangi ketergantungan pada cara-cara tradisional yang memerlukan waktu dan tenaga lebih besar. Dengan mekanisasi pertanian, efisiensi kerja petani diharapkan semakin meningkat.

Mimik juga berpesan agar Alsintan yang diberikan dapat dimanfaatkan

• Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dampak Perumahan Tak Sediakan Lahan TPU, Pemakaman Warga Pendatang Ber KTP Grogol Tulangan Ditolak Warga



Sidoarjo (republikjatim.com) - Dunia Media Sosial (Medsos) digemparkan beredarnya video yang mempertontonkan penolakan warga saat pemakaman warga Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Rabu (17/12/2025). Diduga, penolakan pemakaman jenazah warga pendatang yang sudah ber KTP Desa Grogol itu, selain disebabkan persoalan sengketa jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) desa setempat, juga disebabkan dampak dari banyaknya perumahan yang tidak menyediakan lahan makam sejak awal pembangunan perumahan di Kota Delta Sidoarjo. Dalam video di Medsos yang berdurasi lebih dari satu menit itu, terdapat narasi yang menyebutkan penolakan warga atas pemakaman warga yang baru meninggal dunia itu. Hal ini, diduga akibat persoalan akses jalan menuju area pemakaman desa setempat yang bercampur antara TPU warga desa dan warga perumahan Taman Surya Kencana.

Saat dicek di lapangan, data menyebutkan kasus penolakan pemakaman warga itu, terjadi Rabu (17/12/2025) pagi. Penolakan itu terjadi di TPU Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo yang berdampingan dengan TPU Perumahan Taman Surya Kencana (TSK). Salah seorang warga setempat, M Raugga Maulana mengatakan penolakan pemakaman almarhum itu bukan disebabkan penolakan warga terhadap jenazah yang hendak dimakamkan di TPU itu. Akan tetapi, penolakan disebabkan karena konflik internal soal akses jalan menuju TPU itu.

"Permasalahan (jalan menuju makam umum) itu melibatkan dua pihak. Yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga yang tinggal di sekitar area makam umum. Permasalahan itu sudah terjadi sejak beberapa bulan atau lebih setahun lalu," ungkapnya.

Rangga menceritakan awalnya pemakaman berjalan aman-aman saja dan adem ayem. Bahkan tidak pernah ada persoalan sama sekali.

"Sejak sebelumnya ada warga perumahan di Desa Grogol ini, semua tetangga saya yang meninggal bisa dimakamkan di situ (TPU) desa. Tapi, sejak belakangan terahir muncul permasalahan antara BPD dan warga sekitar makam umum hingga akses jalan akhirnya ditutup warga saat pemakaman itu," jelasnya.

Rangga menguraikan jika jenazah yang hendak dimakamkan di TPU itu merupakan warga pendatang yang telah lama menetap di Desa Grogol. Bahkan, secara administratif sudah tercatat sebagai warga setempat atau ber KTP warga Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo.

"Selama ini, almarhum juga terdaftar sebagai anggota paguyuban Desa Grogol. Meski awalnya jenazah ini pendatang seperti saya, bukan asli Grogol. Tetapi sekarang kan KTP-nya sudah pindah.



ke sini dan ikut paguyuban Desa Grogol. Selanjutnya bisa dimakamkan di TPU setempat," tegasnya.

Rangga memaparkan, sejak dahulu makam umum di kawasan perumahan Taman Surya Kencana itu sudah menyatu dengan makam umum desa setempat. Bahkan, sudah dilengkapi dengan plakat sebagai penanda.

"Akan tetapi, akibat adanya penolakan akses jalan menuju makam umum itu, akhirnya jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Praloyo di JL Raya Lingkar Timur, Sidoarjo," tandasnya.

Sementara hingga berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Grogol maupun Pemerintah Kecamatan Tulangan. Begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat soal penyelesaian persoalan akses jalan menuju makam umum itu. Padahal, jika kasus ini dibiarkan maka akan berdampak pada prosesi pemakaman jenazah lainnya di hari berikutnya. Hel/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Tetapkan Insentif Guru TPQ, Perkuat Pondasi Pendidikan Agama Sejak Dini



KaMedia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya memperkuat pendidikan keagamaan dengan menetapkan Surat Keputusan (SK) Insentif Guru TPQ. SK tersebut resmi ditandatangi Bupati Sidoarjo, Subandi, pada Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan data EMIS, sebanyak 5.623 Guru Ngaji di Kabupaten Sidoarjo menerima insentif sebesar Rp350.000 per guru, dengan total anggaran mencapai Rp23,6 miliar. Insentif ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan sekaligus dukungan nyata bagi para pendidik nonformal yang selama ini berperan penting dalam pembinaan karakter keagamaan masyarakat.

Bupati Subandi menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bagian dari strategi membangun fondasi moral generasi muda Sidoarjo.

“Sebagai pimpinan daerah, kami memiliki tanggung jawab membangun pondasi anak bangsa. Pendidikan agama adalah bagian penting dari terwujudnya cita-cita besar Indonesia,” tegas Subandi.

Ia menilai, guru TPQ memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai agama sejak usia dini, terutama di tengah tantangan sosial dan budaya yang terus berkembang. Dengan adanya insentif ini, Pemkab berharap semakin banyak masyarakat yang terdorong menjadi guru ngaji dan memperkuat pendidikan Al-Qur'an di lingkungannya.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan kepedulian Pemkab Sidoarjo terhadap pendidikan nonformal, yang kerap luput dari perhatian meski kontribusinya sangat besar dalam membentuk karakter masyarakat.

Subandi juga menyampaikan harapannya agar Sidoarjo tumbuh sebagai daerah yang religius dan berkarakter kuat.

“Arek Sidoarjo harus iso ngaji. Itu bukan sekadar slogan, tapi komitmen kita membangun generasi yang beriman, berakhlik, dan berdaya saing,” pungkasnya.



Betonisasi Jalan Hingga Perizinan Digital, Pemkab Sidoarjo Gaspol Kejar Investasi Rp14 Triliun



KaMedia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tancap gas mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai senjata utama mendongkrak kualitas hidup warga sekaligus menarik investasi. Fokus tidak hanya pada fisik, tetapi juga pelayanan publik, pengendalian banjir, dan kemudahan usaha. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, infrastruktur yang kuat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau jalannya bagus, investor datang. Kalau layanan cepat, masyarakat terbantu. Itu target kami," kata Subandi, Selasa (16/12/2025).

Pemkab mengalihkan peningkatan jalan dari aspal ke beton, khususnya di wilayah timur Sidoarjo yang rawan banjir rob. Beton dinilai lebih tahan lama, aman bagi logistik industri, dan menopang mobilitas ekonomi. Tak hanya itu, Pemkab menyiapkan master plan banjir berbasis hulu-hilir, normalisasi sungai, serta pembangunan embung Tambak Sawah seluas 12 hektare yang juga disiapkan sebagai ruang wisata warga.

"Banjir terkendali, investasi dan permukiman lebih aman," tegas Subandi.

Dari sisi layanan, Pemkab mempercepat perizinan melalui digitalisasi penuh. Investor dan warga kini bisa mengurus izin tanpa tatap muka, memotong birokrasi panjang yang selama ini dikeluhkan. Pemkab juga melibatkan lulusan teknik lokal sebagai konsultan internal untuk menekan biaya proyek. Target investasi Sidoarjo tahun depan dipatok Rp14 triliun, dari industri besar hingga UMKM. Dukungan pembiayaan digelontorkan lewat program Kurda berbunga 2 persen untuk UMKM dan KUR sektor pertanian berbunga 6 persen.

Pemkab juga mengoperasikan dua Mal Pelayanan Publik terintegrasi, memudahkan warga mengakses layanan administrasi secara cepat dan digital. Pengawasan lapangan dilakukan intensif melalui rapat bulanan dan koordinasi cepat lintas OPD.

Proyek strategis lain yang disiapkan adalah pembangunan flyover Gedangan. Pemkab telah menyiapkan Rp200 miliar untuk pembebasan lahan dari total kebutuhan Rp320 miliar. Jika rampung pada 2026, pembangunan fisik ditargetkan mulai 2027.

"Pembangunan dan investasi harus berjalan beriringan. Infrastruktur kuat membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi warga," pungkas Subandi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Insentif 5.623 Guru Ngaji Cair Rp 23,61 M; Bupati Subandi: Semoga Bermanfaat bagi Generasi Sidoarjo



Pemkab Sidoarjo membuktikan komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan murid-murid di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Ribuan guru TPQ segera dikucuri bantuan insentif pada 2025 ini. Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan insentif guru TPQ merupakan kepedulian pemerintah untuk ikut menciptakan generasi Qur'ani.

Surat Keputusan (SK) pencarian insentif bagi guru-guru TPQ se-Kabupaten Sidoarjo telah ditandatangani Bupati Subandi pada Rabu (17 Desember 2025). Jumlah penerimanya 5.623 ustaz dan ustazah. Data penerima insentif didasari oleh EMIS, yaitu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Masing-masing guru mengaji bakal mendapatkan Rp 350 ribu per bulan. Setiap guru mengaji dikucuri Rp 4,2 juta selama setahun. Jika ditotal, pada 2025 ini, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana APBD sekitar Rp 23,61 miliar.

"Sebagai pimpinan daerah, kami memiliki tanggung jawab untuk membangun fondasi anak bangsa. Pendidikan agama adalah bagian penting dari terwujudnya cita-cita besar Indonesia," tegas Bupati Subandi di sela-sela menandatangani SK pencairan di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo.

Bupati Subandi berharap, insentif buat ustaz dan ustazah ini menjadi bentuk penghargaan sekaligus dukungan nyata bagi para pengabdi di pendidikan nonformal yang selama ini berperan penting dalam pembinaan karakter generasi muda.

"Kebijakan ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bagian dari tekad bersama untuk membangun fondasi moral generasi muda Sidoarjo," ungkapnya.

Bupati Subandi mengapresiasi peran guru-guru TPQ yang sangat strategis dalam menanamkan nilai keagamaan sejak usia dini. Sebab, tantangan sosial dan budaya terus berkembang. Nilai-nilai dalam Al-Qur'an mampu membekali anak-anak dan generasi muda dalam menghadapinya. Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo berharap semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk mengabdikan diri sebagai guru mengaji. Sehingga, pendidikan Al-Qur'an semakin kuat di lingkungan masing-masing. Kontribusi mereka sangat besar dalam membentuk karakter religius anak-anak menjadi generasi Qur'ani saat ini maupun di masa depan.

"Arek Sidoarjo kudu iso ngaji. Kudu iso baca Al-Qur'an. Itu tidak sekadar slogan, tapi komitmen kita membangun generasi yang beriman, berakhlik, dan berdaya saing," pungkas Bupati Subandi.

